



Intervensi Turki dalam Berupaya Menjaga Kepentingan Nasionalnya pada Konflik Suriah Periode 2014-2019

Hafizurrahman

Universitas Paramadina, Indonesia

Email: hafizurrahman@students.paramadina.ac.id

KATA KUNCI

KKN; long-term development; sustainable program

ABSTRACT

At the end of 2010, the Arab Spring occurred in the Middle East region, where Arab people demanded a revolution in their respective countries from an authoritarian government system to a more democratic government. The Arab Spring started in Tunisia, Egypt, Libya, Yemen, and Syria. However, the process of revolution in Syria did not run smoothly. It began with the emergence of Syrian people demonstrators demanding the downfall of the Bashar Al Assad regime, then turned into an armed conflict between the Syrian government and the opposition groups. As a country directly bordering Syria, Turkey is worried that the conflict in Syria could threaten the safety of the country. As a major country in the Middle East, Turkey also wants to play a role and influence in the process of revolution in Middle Eastern countries, including Syria. By using qualitative approach, this study aims to explain Turkey's interests and intervention in the Syrian conflict in 2014-2019. The result of the study shows two forms of Turkey's interest in Syrian conflict. The first is security interests, in which Turkey feels threatened by the autonomous region for the Kurds in northern Syria and the increasing strength of the PYD and PKK. The second is political interests, in which Turkey eagers to become a regional and influential actor in the Middle East region. Türkiye has also carried out two forms of intervention. The first is diplomatic intervention. Turkey was involved in the Second Geneva Conference, Rejection of Presidential Elections in Syria, the Third Geneva Conference, and the Formation of the Syrian constitutional committee. The second is military intervention, where Turkey has carried out Operation of Shah Euphrates, Formation of the Army of Conquest (Jaysh Al Fath), Operation of Euphrates Shield, Operation of Olive Branch, and Operation of Peace Spring.

ABSTRAK

KEYWORDS

intervention;
interests; turkey;
syrian conflict

Pada akhir tahun 2010 terjadi peristiwa *Arab Spring* di kawasan Timur Tengah, dimana masyarakat Arab menuntut revolusi di negaranya masing-masing dari sistem pemerintahan yang otoriter menjadi pemerintahan yang lebih demokratis, gelombang *Arab Spring* ini bermula dari Tunisia, Mesir, Libya, Yaman, hingga akhirnya berlanjut ke Suriah. akan tetapi proses revolusi di Suriah tidak berjalan mulus, bermula dari munculnya gelombang demonstran rakyat Suriah yang menuntut turunnya rezim Bashar Al Assad, lalu berubah menjadi konflik bersenjata antara pemerintah Suriah dan kelompok-kelompok oposisi. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Suriah, Turki merasa khawatir jika konflik di Suriah dapat mengancam keamanan negaranya, sebagai negara besar di kawasan Timur Tengah Turki juga ingin menancapkan peran dan pengaruhnya dalam proses revolusi di negara-negara Timur tengah, termasuk Suriah. dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif untuk menjawab pertanyaan kepentingan apa saja yang dimiliki oleh Turki dalam konflik Suriah, dan bagaimana bentuk intervensi Turki dalam konflik Suriah pada tahun 2014-2019. Secara garis besar ada dua bentuk kepentingan Turki dalam konflik Suriah. Pertama adalah kepentingan keamanan, dimana Turki merasa terancam dengan terbentuknya wilayah otonomi bagi Bangsa Kurdi di wilayah Utara Suriah dan meningkatnya kekuatan PYD dan PKK di wilayah Utara Suriah. Kedua adalah kepentingan politik, dimana Turki berambisi ingin menjadi aktor regional dan berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Turki juga telah melakukan dua bentuk intervensi. Pertama adalah intervensi diplomatik, dimana Turki terlibat dalam Konferensi Jenewa II, Penolakan terhadap Pemilihan Presiden di Suriah, Keterlibatan Turki dalam Konferensi Jenewa III, dan keterlibatan Turki dalam pembentukan komite konstitusi Suriah. Kedua adalah intervensi militer, dimana Turki telah melakukan Operasi *Shah Euphrat*, Pembentukan Tentara Penaklukan (*Jaysh Al Fath*), Operasi *Euphrates Shield*, Operasi *Olive Branch*, dan Operasi *Peace Spring*.

PENDAHULUAN

Pada tahun 2011 ini Konflik di Suriah telah memasuki tahun ke dua belas, dan konflik ini menjadi salah satu konflik yang terpanjang di Kawasan Timur Tengah. Konflik di Suriah berawal dari sebuah protes terhadap penangkapan beberapa pelajar di kota kecil Dara'a (Starr, 2012: 3). Pada tanggal 15 Maret 2011, terjadi aksi unjuk rasa di kota Dara'a. Dara'a adalah sebuah kota kecil yang terletak di perbatasan antara Jordan dan Suriah. Sebulan sebelum aksi

unjuk rasa itu terjadi, beberapa siswa menuliskan slogan-slogan anti pemerintah di tembok-tembok kota. Lalu Polisi di kota Dar'a melakukan penangkapan dan memenjarakan siswa-siswa itu (Sulaeman, 2013: 100). Siswa-siswa itu terinspirasi oleh gejolak *Arab Spring* yang dimulai dengan revolusi di Tunisia yang mengakibatkan lengsernya Presiden Zainal Abidin Bin Ali pada 14 Januari 2011, mereka juga terinspirasi dari pergolakan di Mesir yang juga mengakibatkan lengsernya Presiden Hosni Mubarak pada 1 Februari 2011. Karena aksinya tersebut maka siswa-siswa itu ditangkap dan dipenjarakan oleh polisi Suriah yang dipimpin oleh Jendral Atef Najib, yang merupakan sepupu Presiden Bashar Al Assad. Akibat penangkapan ini, lahirlah gelombang unjuk rasa untuk menuntut pembebasan siswa-siswa tersebut. Namun respon yang dilakukan oleh tentara Suriah terhadap para demonstran sangat berlebihan, mereka menambaki para demonstran yang mengakibatkan 4 orang meninggal dunia. Akibatnya gelombang unjuk rasa semakin meluas, dimulai dari kota Dara'a lalu menyebar ke kota-kota pinggiran Latakia, Banyas di Pantai Mediterania atau laut Tengah, Homs, Ar Rasta, Hama di Suriah Barat, dan Deir El Zor di Suriah Timur (Muti'ah, 2012: 5).

Banyak keluhan dan tuntutan disuarakan oleh para demonstran, diantaranya: Pembebasan siswa-siswa yang ditahan, penerapan demokrasi, dan memberikan kebebasan yang lebih besar pada rakyat Suriah dalam berekspresi di hadapan umum, para demonstran juga menuntut dicabutnya undang-undang keadaan darurat yang sudah diterapkan lebih dari 50 tahun, diimplementasikannya sistem multi-partai, dilepaskannya 200 tahanan politik yang sudah lama ditahan dalam penjara, dibubarkannya pengadilan keamanan yang selama ini bertugas mengadili kelompok-kelompok oposisi, dibolehkannya melakukan demonstrasi secara damai, dirombaknya kabinet menteri Suriah, dan dihentikannya kekuasaan rezim Bashar Al Assad dari jabatannya sebagai presiden Suriah yang selama ini dipandang otoriter oleh masyarakat Suriah (Sterling, 2012).

Pasca terjadinya gelombang protes di berbagai wilayah di Suriah, munculah Gerakan-gerakan oposisi pemerintah Suriah yang berupaya untuk melengserkan Presiden Suriah Bashar Al Assad dengan cara membentuk kelompok pemberontak bersenjata. Terbentuknya kelompok-kelompok pemberontak bersenjata melawan rezim otoriter diawali dengan terbentuknya *Free Syrian Army* (FSA) yang bertujuan untuk mengganti Bashar Al-Assad dari kursi kePresidenan Suriah beserta dengan jajarannya. FSA didirikan oleh para angkatan militer Suriah yang membelot, kelompok ini semakin terstruktur dan semakin sering melakukan penyerangan ke pemerintah Suriah. Lalu kelompok-kelompok oposisi juga membentuk koalisi anti pemerintahan Suriah yang berbasis di Turki dengan nama *Syrian National Council* (SNC) yang bertujuan untuk mengorganisir para kelompok oposisi (Pontoh, 2019: 47). Selanjutnya Konflik di Suriah berkembang sangat pesat. Keterlibatan kelompok teroris dan pemberontak telah mengubah peta konflik yang tadinya hanya bersifat bipolar, kini jauh lebih kompleks. Kelompok oposisi bukan hanya kelompok yang ingin menggulingkan rezim Bashar Al Assad, namun kelompok pemberontak juga terpecah menjadi banyak faksi dengan tujuan yang berbeda-beda, faksi oposisi ini terdiri atas kelompok-kelompok kecil yang beroperasi di tingkat lokal dan kelompok-kelompok yang memiliki kekuatan yang lebih besar dengan afiliasi antar negara dan antar kelompok. Koalisi dari pemberontakan utama terdiri dari *Free Syrian Army* sebagai yang terbesar, *Martyrs of Syria Brigades*, *Northern Storm Brigade* dan *Ahrar Souriya Brigade* (Pontoh, 2019: 45).

Dengan semakin memanasnya konflik di Suriah, Turki merasa khawatir konflik ini akan berdampak pada negaranya, karena secara geografis wilayah Utara Suriah merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan wilayah Tenggara Turki (Hatem, 2013: 51). Dengan begitu Turki merasa memiliki kepentingan dalam konflik Suriah, sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Suriah Turki tidak ingin ada ancaman keamanan dalam negaranya, dan sebagai salah satu negara besar di Kawasan Timur Tengah Turki juga ingin berperan dan menancapkan pengaruhnya di Kawasan ini, khususnya dalam momen *Arab Spring* yang menyebabkan revolusi di negara-negara Arab termasuk Suriah, Turki juga ingin memiliki peran dalam revolusi di negara tetangganya itu.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode yang penulis gunakan adalah metode penelitian kualitatif, dengan melihat intervensi Turki dalam berupaya menjaga kepentingan nasionalnya pada konflik Suriah periode 2014-2019 sebagai studi kasus untuk menghimpun dan menganalisis data. Penelitian kualitatif banyak dilakukan di lingkungan ilmu-ilmu sosial seperti antropologi, sosiologi, politik dan hubungan internasional (Suryadi, 2016: 14). Secara definisi penelitian kualitatif adalah teknik penelitian yang intuitif dan sistematis dalam membantu peneliti untuk menghasilkan pengetahuan secara efisien dan koheren. Tujuan dari penelitian kualitatif adalah untuk meningkatkan pemahaman tentang fenomena, aktifitas-aktifitas dan proses-proses sosial. Penelitian kualitatif lebih fokus pada makna (*meaning*) dan pemahaman (*understanding*) dibandingkan kuantifikasi. Laporan penelitian kualitatif juga condong memiliki struktur atau kerangka kerja yang fleksibel (Suryadi, 2016: 62). Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis akan menggunakan dua teknik. Pertama penulis menggunakan teknik wawancara dari beberapa narasumber. Kedua penulis juga menggunakan teknik studi pustaka yang bersumber dari buku, jurnal, karya ilmiah, laporan penelitian, berita jurnalistik, dokumen perjanjian dan situs internet.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepentingan Nasional Turki Pada Konflik Suriah Periode 2014-2019

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan kepentingan apa saja yang dimiliki oleh Turki dalam konflik Suriah sehingga Turki merasa perlu untuk melakukan intervensinya dalam konflik Suriah. dari data yang penulis himpun, penulis berhasil menemukan setidaknya ada dua kepentingan Turki dalam konflik Suriah, yaitu: 1. Kepentingan keamanan, 2. Kepentingan politik Turki di kawasan Timur Tengah.

1. Kepentingan Keamanan

Faktor keamanan merupakan salah satu bagian dari kepentingan nasional yang paling penting bagi setiap negara, begitu pun oleh Turki. Ada beberapa bentuk persepsi ancaman terhadap keamanan dan stabilitas domestik Turki yang terdapat dalam konflik Suriah, dan ini berkaitan dengan meningkatnya kekuatan Bangsa Kurdi di wilayah Utara Suriah. Diantara bentuk ancaman-ancaman tersebut ialah : a. Terbentuknya wilayah otonomi bagi bangsa Kurdi di Wilayah Utara Suriah, b. Meningkatnya kekuatan PYD dan PKK di wilayah Utara Suriah.

a. Terbentuknya Wilayah Otonomi Bagi Bangsa Kurdi di Wilayah Utara Suriah

Di bagian Utara Suriah, terdapat wilayah yang dihuni oleh mayoritas bangsa Kurdi Suriah, jumlah mereka yang tinggal di wilayah tersebut diperkirakan 2 juta jiwa, dan itu setara dengan 10 persen dari total penduduk Suriah (Zalewski, 2013) Wilayah bagian Utara Suriah ini secara geografis berbatasan langsung dengan wilayah Tenggara Turki, dan di wilayah itu juga menjadi tempat tinggal bagi bangsa Kurdi Turki. Kedekatan geografis dan kesamaan etnis ini lah yang menjadi alasan logis bagi bangsa Kurdi Suriah dan bangsa Kurdi Turki untuk menyatukan kekuatan dan membentuk gerakan pemberontakan Kurdistan (Luerdi, 2016: 38). Dalam wawancara penulis bersama Ibu Dina Y Sulaiman selaku Direktur Indonesia *Center For Middle East Studies*, beliau mengatakan “Bangsa kurdi memang sering kali dianggap ancaman oleh negara-negara yang ditempatinya, termasuk oleh Turki, Suriah, Iran, dan Iraq. Hal ini disebabkan karena mereka menginginkan terbentuknya negara Kurdi di tanah negara yang mereka tempati. Mereka selalu meminta hak otonomi atas wilayah yang ditempatinya atau meminta kebebasan atas wilayah tersebut”.

Pada awal konflik Suriah, mayoritas bangsa Kurdi di wilayah Utara Suriah bergabung dengan koalisi oposisi di bawah naungan SNC untuk Bersama-sama melengserkan Pemerintahan Bashar Al Assad, namun mereka keluar dari koalisi itu setelah Pemerintah Suriah memberikan dukungan kepada *Democratic Union Party/Partiya Yekîtiya Demokrat* (PYD) sebagai organisasi kelompok Kurdi paling kuat di Suriah untuk melawan *Free Syrian Army* (FSA) yang menduduki sebagian Wilayah Utara Suriah dan memberikan otonomi kepada mereka untuk mengatur wilayahnya sendiri di Utara Suriah (Ağca, 2013: 99). Kebijakan ini menjadi kebijakan yang paling berpengaruh bagi Bangsa Kurdi, sebab pemberian otonomi dalam bidang politik dan pemerintahan merupakan hal yang sudah lama diidamkan dan diperjuangkan oleh Bangsa Kurdi. Hal ini dilakukan oleh Pemerintah Suriah untuk mengurangi jumlah dan kekuatan kelompok-kelompok oposisi. Dengan begitu Pemerintah Suriah juga bisa mengandalkan Bangsa Kurdi untuk melawan kelompok-kelompok oposisi yang ingin mengambil alih wilayah Utara Suriah (Luerdi, 2016: 39).

Kebijakan ini dilakukan oleh pemerintah Suriah pada pertengahan Juli 2012 dengan cara menarik sebagian besar pasukan militer Suriah dari Wilayah Utara Suriah dan secara efektif menyerahkan kendali atas wilayah tersebut kepada PYD (Caves, 2012: 1). Lalu pada tahapan berikutnya, berbagai kelompok Kurdi di Wilayah Utara Suriah membuat sebuah wadah koordinasi bersama yang diberi nama *National Body for Democratic Change* (Caves, 2012: 3). Wadah koordinasi ini adalah tempat bagi kelompok-kelompok bangsa Kurdi Suriah dalam memperjuangkan kepentingannya di wilayah Utara Suriah dengan memanfaatkan momentum konflik yang terjadi. Dan mereka berhasil merebut banyak daerah di wilayah Utara Suriah setelah penarikan pasukan militer Suriah dari wilayah tersebut di pertengahan tahun 2012 (Dettmer, 2013).

Dengan banyaknya daerah-daerah yang berhasil dikuasai oleh kelompok-kelompok Kurdi, maka mereka menyatakan diri sebagai penguasa sah atas wilayah Utara Suriah, lalu mereka membuat sebuah badan pemerintahan regional otonomi Kurdi yang diberi nama *Supreme Kurdish Committee* (SKC) (Luerdi, 2016: 39). Dalam sudut pandang Turki, pembentukan wilayah otonomi bagi bangsa Kurdi di wilayah Utara Suriah sangatlah berbahaya, karena hal itu dapat memicu tumbuhnya kembali keinginan kelompok-kelompok Kurdi di Turki untuk mendapatkan hak otonomi khusus di wilayah yang mereka tempati.

Bahkan kelompok *Kurdistan Workers' Party/Parti Karkerani Kurdistan* (PKK) yang mengklaim bahwa mereka adalah representasi bangsa Kurdi di Turki masih menuntut adanya otonomi khusus di wilayah mereka. Namun pemerintah Turki menolak memberikan otonomi khusus kepada mereka karena negara Turki berlandaskan kepada konsep kebangsaan, dimana seluruh warga negaranya memiliki hak dan perlakuan yang sama, baik itu dari etnis Turki, Roma, Yunani, Kurdi, dan etnis lainnya. Sehingga tidak perlu adanya perlakuan istimewa kepada salah satu kelompok etnis (Al Jazeera, 2014).

b. Meningkatnya Kekuatan PYD dan PKK di Wilayah Utara Suriah

PYD merupakan anak dari organisasi PKK yang menaungi kepentingan-kepentingan bangsa Kurdi, PYD juga merupakan organisasi bangsa Kurdi paling kuat di Suriah, dan misi PYD adalah menyerukan pengakuan konstitusional atas hak-hak bangsa Kurdi dan menuntut otonomi demokratis di wilayah Utara Suriah yang ditempati oleh bangsa Kurdi (Carnegie, 2012). Sedangkan PKK adalah kelompok separatis Kurdi yang pengaruhnya meluas terutama di Utara Iraq dan Tenggara Turki. Anggota PKK sebagian besar berasal dari Kurdi Turki. Tujuan awal PKK adalah untuk mendirikan negara Kurdi merdeka di Turki Tenggara pada awal tahun sembilan puluhan (Al Jazeera, 2014).

Dalam pandangan Turki, PYD dan PKK sudah memiliki agenda internasional untuk jangka panjang, diantaranya ialah mendirikan Negara Kurdistan yang independen di wilayah Utara Suriah, Tenggara Turki, Utara Iraq, dan Timur Iran. Kecurigaan Turki dilatarbelakangi dengan aktifitas politik PYD yang menjalin hubungan erat dengan Kurdi Iraq dan tetap menjaga hubungan erat dengan PKK. Menurut Turki terbentuknya wilayah otonomi bagi bangsa Kurdi di wilayah Utara Suriah adalah sebagai batu loncatan untuk mendirikan negara Kurdistan yang independen sesuai dengan yang mereka rencanakan (Luerdi, 2016: 40). Di sisi lain, pemerintah Suriah membiarkan PYD secara leluasa mengontrol keamanan wilayah Utara Suriah. Dalam mengontrol wilayah Utara Suriah, PYD memiliki kekuatan militer yang diberinama *People's Protection Unit* (YPG), dan menurut PYD mereka sudah memiliki 50.000 pejuang Kurdi yang sudah siap menjaga keamanan wilayahnya pada pertengahan tahun 2014 (Global Security, 2014).

Selanjutnya Pemerintah Suriah juga memfasilitasi masuknya ratusan pejuang PKK ke wilayah Utara Suriah melalui koordinasi dengan pemerintah Irak, dan mereka memasuki wilayah Utara Suriah dengan peralatan tempur lengkap untuk mendukung PYD dan sayap militernya YPG yang berjuang mengambil alih daerah-daerah yang dikuasai kelompok oposisi FSA (Carnegie, 2013). PKK dan YPG membangun beberapa patroli di jalan-jalan sekunder menuju beberapa desa perbatasan di distrik Jawadiya dan Derik, dan kemudian mengambil alih beberapa desa di perbatasan Suriah-Turki pada awal 2012. Pemimpin PKK memerintahkan para pejuangnya memasuki Suriah, karena periode antara 2012-2015 adalah periode di mana sejumlah besar pejuang PKK pindah ke Suriah (Noon Post, 2020). Lalu pada 10 Oktober 2015, PYD dan PKK bergabung dalam pembentukan *Syrian Democratic Forces* (SDF), sebuah kekuatan militer nasional terpadu yang menyatukan kelompok-kelompok Kurdi, orang-orang Arab, dan semua komponen lainnya. Diantaranya ialah YPG yang merupakan sayap militer PYD dan PKK, Koalisi Arab Suriah, Ahrar Al Zawiya, Brigade Sultan Selim, Brigade Martir Atareb, Brigade Revolusioner Raqqa, dan Brigade

Syams Al Shamal. Lalu YPG mendominasi kekuatan ini dan menjadi tulang punggung pasukan SDF ini (BBC News, 2017).

Berikutnya pada tahun 2017, kekuatan Kurdi Suriah yang dipimpin oleh PYD dan PKK melalui dominasi mereka atas SDF, secara efektif menguasai lebih dari seperempat wilayah Suriah, wilayah terbesar kedua setelah wilayah Suriah yang dikuasai pemerintah. Untuk daerah-daerah yang termasuk dalam wilayah Rojava dan Kurdistan Suriah. Kurdi Suriah tidak memperjuangkan kemerdekaan atas wilayah yang dikuasainya, melainkan untuk membangun pemerintahan sendiri yang lebih besar dan pemerintahan lokal yang lebih kuat. Bahkan hingga pada tahun 2019, pasukan SDF yang dipimpin oleh YPG berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Utara Suriah dan Timur Suriah (Portzer, 2020: 99).

Dalam wawancara penulis bersama bapak Saif Annur selaku Staf Fungsi Politik KBRI Damaskus Suriah, beliau mengatakan “Diantara kepentingan Turki yang paling besar di Suriah adalah menjaga keamanan nasionalnya dari ancaman kelompok-kelompok Kurdi, khususnya kelompok PKK, sebab kelompok ini dianggap kelompok sparatis oleh Turki, kelompok ini ingin menciptakan negara sendiri di wilayah Tenggara Turki dan ingin memisahkan diri dari Turki, kelompok ini bertujuan menyatukan seluruh bangsa Kurdi yang tersebar di beberapa negara sekitar Turki, dan kelompok ini telah melakukan perlawanan bersenjata dan pemberontakan kepada pemerintah Turki sejak akhir tahun 1970 an”. Dengan demikian, Turki memandang kebijakan pemerintah Suriah yang mengizinkan PYD untuk mengontrol wilayah Suriah Utara dan memfasilitasi masuknya pejuang PKK ke Suriah Utara adalah sebuah ancaman keamanan bagi Turki, sebab selama ini PKK dianggap sebagai kelompok sparatis yang selama ini memberontak pada pemerintah Turki, sehingga eksistensi PKK di Utara Suriah yang berbatasan langsung dengan Tenggara Turki dipandang sangat mengancam keamanan Turki.

2. Kepentingan Politik

Dalam konflik Suriah, Turki memiliki kepentingan politik di kawasan Timur Tengah, dimana Turki ingin menunjukkan eksistensinya sebagai negara kuat, dan berupaya untuk menancapkan pengaruhnya pada negara-negara di kawasan Timur tengah, khususnya saat momen terjadinya *Arab Spring*. Diantara kepentingan politik Turki dalam konflik Suriah ialah Turki berambisi ingin menjadi aktor regional dan berpengaruh di kawasan Timur Tengah. Turki adalah negara yang mempunyai posisi geografis yang unik, Turki terletak diantara benua Asia dan Eropa, hal ini membuat Turki menjadi negara yang cukup strategis. Beberapa tahun belakangan ini, terlihat peningkatan peran dan keinginan Turki di sebagian besar masalah penting di kawasan Timur Tengah, terutama setelah Partai Keadilan dan Pembangunan *Adalet ve Kalkınma Partisi* (AKP) berkuasa pada tahun 2002, mereka mengumumkan peluncuran kebijakan baru Turki terhadap wilayah tersebut, mereka menegaskan kehadiran dan posisi Turki sebagai kekuatan sentral stabilitas dan pihak yang aktif dalam mengatasi berbagai isu dan konflik di kawasan Timur Tengah (Taher, 2013: 1)

Dalam konteks *Arab Spring*, pemerintah Turki memberikan dukungan terhadap proses revolusi negara-negara Arab, termasuk revolusi Suriah. Turki mendukung revolusi ini baik secara politik maupun militer. Momen ini dijadikan Turki sebagai kesempatan emas untuk berperan aktif dan menebar pengaruhnya di kawasan Timur Tengah agar Turki dipandang

Intervensi Turki dalam Berupaya Menjaga Kepentingan Nasionalnya pada Konflik Suriah Periode 2014-2019

sebagai negara model terkemuka di kawasan Timur Tengah (Silmi, 2017: 1). Turki secara konsisten mendukung revolusi di Suriah dengan cara memberikan dukungan kepada kelompok-kelompok oposisi yang ingin melengserkan rezim Bashar Al Assad, bahkan Turki memfasilitasi pembentukan SNC dan FSA di negaranya, yang mana keduanya merupakan oposisi terkuat rezim Bashar Al Assad. Dari keterangan-keterangan di atas, terlihat bahwa Turki ingin memperdalam pengaruhnya di kawasan Timur Tengah dengan memanfaatkan momen *Arab Spring*. Turki juga menegaskan bahwa dirinya siap menjadi mediator dan model transisi yang stabil untuk negara-negara di kawasan Timur Tengah. Turki juga siap memberikan bantuan di bidang keuangan, keahlian dan teknis bagi warga sipil yang wilayahnya terkena dampak gelombang *Arab Spring*. Seperti Libya, Mesir, Tunisia, dan Suriah (Bilgin, 2014: 100). Dengan upaya-upaya ini, Turki merasa sangat percaya diri bahwa dia bisa membawa perubahan di kawasan Timur Tengah, dan bisa menjadi patron serta pemimpin bagi negara-negara di kawasan Timur Tengah (Demir, 2017: 7).

Dalam wawancara penulis dengan Bapak Saif Annur terkait kepentingan Turki, beliau mengatakan bahwa “Turki memiliki keinginan untuk menjadi pemimpin negara-negara di kawasan Timur Tengah, sebab Turki merasa dirinya negara yang paling ideal yang mampu menyatukan antara islam moderat dan demokrasi di kawasan Timur Tengah, sehingga Turki pantas menjadi patron dan dicontoh oleh negara-negara Timur Tengah. Turki juga masih terbawa dengan bayangan-bayangan kejayaan masa lalunya ketika Turki masih berbentuk Khilafah Utsmaniyah, dimana semua negara-negara di Timur Tengah tunduk kepadanya, sehingga Turki mempunyai rasa percaya diri yang tinggi untuk kembali memimpin kawasan Timur tengah. Untuk mencapai rencananya ini, Turki berupaya menebar pengaruhnya di negara-negara Timur tengah, dengan mendukung revolusi negara-negara Timur Tengah agar terciptanya pemimpin-pemimpin baru yang satu visi dengannya, dengan memegang erat prinsip politik islam moderat yang menyatu dengan demokrasi”.

Bentuk Intervensi Turki dalam Konflik Suriah Periode 2014-2019

Pada bagian ini penulis akan menjelaskan bentuk intervensi Turki dalam konflik Suriah selama periode tahun 2014-2019. Setidaknya penulis berhasil menemukan ada dua bentuk intervensi yang dilakukan oleh Turki dalam konflik Suriah, yaitu Intervensi Diplomatik dan Intervensi Militer.

1. Intervensi Diplomatik

Sejak awal konflik di Suriah berkejolak, Turki sudah melakukan beberapa bentuk intervensi diplomatik, Namun disini penulis akan hanya fokus kepada bentuk intervensi diplomatik Turki pada periode 2014-2019 saja, diantara bentuk intervensi diplomatik Turki ialah a. Keterlibatan Turki dalam Konferensi Jenewa II, b. Penolakan Terhadap Pemilihan Presiden di Suriah, c. Keterlibatan Turki dalam Konferensi Jenewa III, d. Keterlibatan Turki dalam Pembentukan Komite Konstitusi Suriah.

a. Keterlibatan Turki dalam Konferensi Jenewa II

Konferensi Jenewa ialah sebuah pertemuan internasional yang khusus dilaksanakan untuk membahas kondisi konflik Suriah, dengan tujuan mencari solusi jalan keluar melalui forum diskusi dan perundingan. Konferensi ini dilakukan karena kondisi konflik di Suriah yang semakin buruk dan banyaknya pelanggaran HAM yang terjadi disana. konferensi

Jenewa I dilaksanakan pada 30 Juni 2012 di Swiss. sedangkan konferensi Jenewa II dilaksanakan pada 22-31 Januari 2014 untuk pertemuan pertama, dan 10-15 Februari 2014 untuk pertemuan kedua. pertemuan ini bertujuan untuk melakukan negosiasi antara pihak oposisi dan rezim Suriah. pertemuan ini difasilitasi oleh PBB dengan mengikutsertakan pihak-pihak yang telah hadir di pertemuan sebelumnya (Luerdi, 2016: 46).

Seminggu sebelum konferensi ini, presiden Turki menyatakan bahwa “Turki sedang mempelajari bagaimana solusi untuk mengatasi konflik di Suriah yang berkaitan dengan kepentingan banyak pihak. Ini membutuhkan kesabaran, ketenangan dan diplomasi senyap, sebab konflik di Suriah sangat mempengaruhi stabilitas di kawasan dan juga keamanan Turki” (Asharqalarabi, 2014). lalu pada 17 Januari 2014, pemerintah Turki mengadakan pertemuan dengan Koalisi Revolusioner Nasional Suriah/*Syrian National Revolutionary Coalition* (SNRC) dan kelompok oposisi Suriah lainnya untuk membahas keputusan yang akan dibawa dalam konferensi Jenewa II, dan untuk mengatasi isu-isu paling penting yang dapat dibahas dalam konferensi tersebut, dalam pertemuan ini pemerintah Turki terus meyakinkan kelompok oposisi untuk hadir berpartisipasi dalam konferensi itu dan Turki berjanji akan terus memberikan dukungannya kepada kelompok oposisi dalam konferensi itu (Silmi, 2017: 12).

Berikutnya dalam konferensi Jenewa II ini, Turki menyuarakan agar dibentuknya badan transisi di Suriah. Turki juga menekankan perlunya pergantian rezim kekuasaan di Suriah, karena bagi Turki keberadaan rezim Bashar Al Assad yang berkuasa saat ini hanya akan memperparah konflik, dan ini bukan hanya mengancam rakyat Suriah saja, tapi juga mengancam keamanan stabilitas regional dan juga keamanan Turki. Menurut Turki, konflik di Suriah ini berakar pada rezim, sehingga solusi utamanya adalah pelengseran rezim (Luerdi, 2016: 46). Akhirnya konferensi Jenewa II pun tak membuahkan hasil, pertemuan yang diadakan di markas PBB ini dinilai sia-sia karena tidak ada kesepakatan yang dicapai bersama sehingga tidak menghasilkan keputusan apapun. Hal ini disebabkan karena kelompok oposisi yang dipimpin oleh SNC serta negara-negara pendukungnya termasuk Turki menginginkan pergantian rezim sebagai solusi masalah ini, dilanjutkan dengan pembentukan badan pemerintahan transisi sementara, dan untuk selanjutnya diadakan pemilihan umum nasional di Suriah. sedangkan pemerintah Suriah beserta sekutunya menolak keras tuntutan ini. Mereka ingin penyelesaian konflik Suriah diserahkan kepada mereka tanpa intervensi dari pihak luar (Al Jazeera, 2014).

b. Penolakan Terhadap Pemilihan Presiden di Suriah

Pada 03 Juni 2014 jutaan warga Suriah melakukan pemungutan suara di wilayah-wilayah yang berada di bawah kendali pemerintah Suriah untuk memberikan suara mereka dalam pemilihan presiden, Pemungutan suara hanya akan berlangsung di daerah-daerah yang dikendalikan oleh pasukan pemerintah Suriah, sementara di daerah-daerah yang dikendalikan oleh kekuatan oposisi, terutama di Utara dan Timur Suriah, tidak akan ada tempat pemungutan suara (BBC News, 2014). Pemilu ini merupakan pemilu pertama dalam sejarah perpolitikan dalam negeri Suriah sejak keluarga Assad berkuasa di Suriah. karena sebelumnya presiden yang memimpin Suriah bisa dengan mudah melanjutkan kekuasaannya hanya dengan melalui referendum (Al Jazeera, 2014).

Turki beserta PBB, Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Arab menolak dan mengancam rencana pemilihan presiden itu. Karena hal itu dianggap bertentangan dengan upaya internasional dalam mencari solusi untuk penyelesaian konflik Suriah (ACRPS, 2014). Kelompok oposisi yang dipimpin oleh SNC pun menolak rencana pemilihan presiden ini, karena hal ini dianggap tidak representatif dan ilegal. Pemilihan ini dilaksanakan ketika konflik sedang berlangsung dan setengah dari rakyat Suriah tidak bisa menyalurkan suaranya. Pemerintah Suriah juga melarang tokoh-tokoh oposisi untuk ikut serta dalam bursa pencalonan presiden Suriah (Luerdi, 2016: 47).

Pasca pengumuman hasil pemilu ini, Turki menolak keras hasil pemilu di Suriah. Menurut Turki pemilihan presiden di Suriah hanyalah pemilu formalitas untuk memuluskan jalan rezim Bashar Al Assad dalam memperpanjang masa kepemimpinannya. Dan sebaliknya Turki justru tetap berupaya membentuk badan pemerintahan transisi Suriah, dan menuntut turunnya rezim Bashar Al Assad, sampai akhirnya dilaksanakan pemilu nasional Suriah yang diikuti oleh seluruh elemen politik masyarakat Suriah (Al Jazeera, 2014). Menurut Turki, hasil pemilu ini tidak sah karena tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat Suriah, diantaranya ialah para pengungsi Suriah. Sebab menurut hasil survei Pusat Penelitian dan Studi Kebijakan Arab/*Arab Center For Research & Policy Studies* (ACRPS), 78 persen pengungsi Suriah di empat wilayah suka menganggap pemilihan presiden Suriah tidak sah. Menurut hasil survei tersebut juga mengatakan bahwa 75 persen dari komunitas Suriah di luar tanah air mereka percaya bahwa pemilihan presiden pada 03 Juni itu tidak mewakili suara rakyat Suriah, karena mayoritas warga Suriah yang tetap di rumah dan di luar negeri tidak berpartisipasi di dalamnya, sehingga kehadiran para pemilih akan terbatas pada pendukung rezim saja (Al Jazeera, 2014). Alasan lain Turki dan kelompok oposisi dengan keras menolak hasil pemilu ini karena pemilu hanya dilaksanakan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh pemerintah Suriah, khususnya di kota Damaskus dan kota-kota besar lainnya. Akan tetapi pemilu tidak diadakan di wilayah-wilayah yang dikuasai oleh oposisi, terutama di wilayah Utara dan Timur Suriah. Turki dan kelompok oposisi mengatakan bahwa pemilu ini merupakan tindakan yang sangat memalukan karena dianggap tidak adil dan dilakukan secara sepihak (BBC News, 2014).

c. Keterlibatan Turki dalam Konferensi Jenewa III

Akibat kegagalan konferensi Jenewa II dalam mencapai kesepakatan antar pihak oposisi dan pemerintah Suriah yang dikuasai oleh rezim Bashar Al Assad, maka PBB kembali mengatur agenda pertemuan untuk kembali membahas penyelesaian konflik di Suriah yang melibatkan pemerintah Suriah dan kelompok oposisi, pertemuan ini dinamakan konferensi Jenewa III. Dewan Keamanan PBB beserta *International Syria Support Group* (ISSG) berupaya untuk menyiapkan pertemuan ini dan ditargetkan akan dimulai pada 1 Januari 2016. Akan tetapi pertemuan ini ditangguhkan beberapa saat karena terdapat banyak kelompok yang menolak hadir dan memboikot rencana pertemuan ini (Al Jazeera, 2017).

Begitupun dengan Turki, Turki mengumumkan bahwa mereka akan memboikot rencana pertemuan ini. Turki menyatakan hal ini karena Turki keberatan dengan diundangnya PYD dalam pertemuan ini sebagai salah satu kelompok oposisi. Turki menegaskan bahwa PYD bukanlah faksi oposisi pemerintah Suriah yang dipimpin oleh rezim Bashar Al Assad, justru sebaliknya PYD sering berkerjasama dengan rezim Bashar Al

Assad. Menurut Turki, jika PYD ingin berpartisipasi dalam pertemuan ini, maka PYD harus duduk di posisi pendukung rezim Bashar Al Assad, bukan justru duduk bersama kelompok oposisi pemerintah Suriah. Sedangkan kehadiran PYD di pertemuan ini karena didesak oleh Amerika Serikat. Terkejut dengan desakan Amerika Serikat ini, maka Turki mengumumkan bahwa mereka akan memboikot pertemuan ini dan mengambil sikap tegas. Turki pun mempengaruhi kelompok-kelompok oposisi lain agar ikut memboikot dan menolak hadir di pertemuan ini. Dalam menghadapi reaksi-reaksi ini, Amerika Serikat melepas desakannya kepada PYD dan akhirnya PYD dicoret dari daftar hadir pertemuan ini (Al Sharq, 2016).

Akibat kegaduhan ini, PBB baru bisa mengumumkan dimulainya pertemuan ini secara resmi Pada 1 Februari 2016, akan tetapi pertemuan ini tidak menghasilkan titik temu dan kesepakatan. Akhirnya pada 3 Februari 2016, utusan PBB Staffan De Mistura mengumumkan penundaan pertemuan ini dan akan dilanjutkan pada 25 Februari 2016, lalu pertemuan negosiasi ini kembali diadakan bersamaan dengan masuknya krisis Suriah pada tahun keenam, akan tetapi mereka kembali gagal mencapai kesepakatan pada pertemuan negosiasi ini, karena adanya perbedaan pandangan antara pemerintah Suriah perwakilan rezim Bashar Al Assad dan kelompok-kelompok oposisi, termasuk Turki. terutama perbedaan pandangan dalam implementasi paragraf 12 dan 13 dari Resolusi PBB no 2254, dan perselisihan mengenai pembentukan oposisi Suriah dan delegasi negosiasinya. Turki dan kelompok oposisi juga menolak kepemimpinan Bashar Al Assad pada pemerintahan Suriah di masa depan dalam wujud Suriah yang baru (Al Jazeera, 2017).

d. Keterlibatan Turki dalam Pembentukan Komite Konstitusi Suriah

Resolusi Dewan Keamanan PBB no. 2254 yang ditetapkan pada tahun 2015 mengamanatkan PBB untuk memfasilitasi proses penyelesaian konflik di Suriah, resolusi ini mengatur jadwal dan proses untuk menyusun konstitusi baru, di mana pemilihan umum yang bebas dan adil akan diadakan di bawah pengawasan PBB, sesuai dengan standar transparansi dan akuntabilitas internasional tertinggi, dengan melibatkan semua warga Suriah yang dapat berpartisipasi, termasuk mereka yang tinggal di luar Suriah. Berdasarkan resolusi ini tentang pemenuhan mandatnya, Utusan Khusus PBB untuk Suriah telah membentuk komite konstitusi yang kredibel, seimbang dan inklusif di bawah kepemimpinan dan kepemilikan Suriah. Komite Konstitusi ini dibentuk berdasarkan kesepakatan antara Pemerintah Republik Arab Suriah dan Komisi Negosiasi Oposisi Suriah tentang perjanjian, kerangka acuan, dan aturan prosedur dasar. Pembentukan Komite Konstitusi ini diumumkan oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada 23 September 2019, komite ini dinamakan Komite Konstitusi Suriah/*Syrian Constitutional Committee* (SCC). (OSES, 2019).

SCC terdiri dari dua badan, yaitu badan besar dan badan kecil, dan keduanya terdiri dari tiga blok. Badan besar SCC beranggotakan 150 orang, adapun komposisinya ialah 50 kandidat merupakan perwakilan dari pemerintah Suriah, lalu 50 kandidat dari perwakilan Komisi Negosiasi Oposisi Suriah yang terdiri dari kelompok-kelompok oposisi, dan 50 kandidat merupakan perwakilan dari masyarakat sipil. Adapun Badan kecil SCC beranggotakan 45 orang, terdiri dari 15 kandidat perwakilan pemerintah Suriah, 15 kandidat dari perwakilan Komisi Negosiasi Oposisi Suriah, dan 15 kandidat dari perwakilan masyarakat sipil (OSES, 2019).

Adapun keterlibatan Turki dalam pembentukan komite ini adalah Turki menjadi salah satu penentu komposisi dari anggota komite ini. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Rusia Vladimir Putin dan Presiden Iran Hassan Rouhani mengumumkan setelah pertemuan puncak mereka di Ankara, mereka telah mencapai kesepakatan tentang komposisi anggota SCC, yang dapat mewakili langkah penting menuju pencapaian solusi di negara itu. Ini adalah pertemuan puncak kelima dari tiga pemimpin mengenai krisis Suriah, di mana mereka berjanji untuk bekerja sama dalam mencegah krisis kemanusiaan di Suriah (France, 2019). Turki juga termasuk penggagas dibentuknya komite ini, gagasan pembentukan komite ini sudah diajukan oleh Turki pada Januari 2019 kepada PBB. Turki juga termasuk negara penjamin proses perdamaian ini bersama dengan Rusia dan Iran. Menteri Luar Negeri Turki juga menyatakan bahwa Turki telah menetapkan nama-nama untuk kandidat-kandidat komite ini (Al Jazeera, 2018). Lalu Turki menjadikan SNC/SNRC sebagai anggota Komisi Negosiasi oposisi Suriah yang merupakan wadah bagi kelompok oposisi pemerintah Suriah. sebagai organisasi yang didirikan di Turki dan selalu difasilitasi oleh pemerintah Turki, maka SNC/SNRC terindikasi membawa kepentingan Turki dalam komite ini. Dan ini berdampak pada hampir tidak adanya kesepakatan antar ketiga blok sejak pertemuan pertama SCC (MEI, 2021).

2. Intervensi Militer

Adapun dalam hal intervensi militer, setidaknya penulis menemukan enam intervensi militer Turki dalam konflik Suriah dari kurun waktu 2014-2019, yaitu a. Operasi *Shah Eufkrat*, b. Pembentukan Tentara Penaklukan (*Jaysh Al Fath*), c. Operasi *Euphrates Shield*, d. Operasi *Olive Branch*, e. Operasi *Peace Spring*.

a. Operasi *Shah Eufkrat*

Pada Sabtu, 21 Februari 2015 tentara Turki untuk pertama kalinya melakukan operasi militer di wilayah Suriah, operasi militer ini berjalan dengan sukses dan dinamakan dengan "Operasi *Shah Eufkrat*". Operasi ini dilakukan secara senyap pada malam hari dengan mengerahkan puluhan tentara, tank dan kendaraan militer, operasi ini bertujuan untuk mengambil dan memindahkan situs makam Suleiman Shah, kakek pendiri Kekaisaran Ottoman, dan mengevakuasi tentara Turki yang menjaga situs makam tersebut, lalu situs makam Suleiman Shah ini dipindahkan ke Turki untuk kemudian dimakamkan kembali (Silmi, 2017: 13). Komplek makam Suleiman Shah berdiri di area seluas beberapa ratus meter persegi, dan ini merupakan wilayah dibawah kedaulatan Turki, sesuai dengan Perjanjian Ankara yang ditandatangani antara Prancis dan pemerintah Dewan Nasional Agung pada tahun 1921. Pasal IX Konvensi menetapkan bahwa makam itu tetap berada di bawah kekuasaan Turki, dapat dilindungi oleh tentara Turki, dan bendera Turki dapat dikibarkan di atasnya. Ini adalah satu-satunya wilayah Turki yang berdaulat di luar perbatasan Turki (Turkpress, 2015).

Menurut perdana menteri Turki, operasi ini dilakukan oleh Turki karena situasi yang memburuk di sekitar situs makam tersebut. Makam tersebut terletak di kota Ain Al-Arab yang merupakan wilayah di bawah kendali pasukan Kurdi Suriah YPG, Turki melihat ini merupakan ancaman bagi situs makam yang sangat berharga bagi sejarah Turki, sehingga pemerintah Turki memutuskan untuk mengevakuasi situs makam tersebut beserta tentara

Turki yang menjaga situs makam tersebut (Al Jazeera, 2015). Akibat operasi ini, Kementerian Luar Negeri Suriah mengecam dan mengeluarkan pernyataan bahwa "operasi militer yang dilakukan oleh Turki merupakan agresi secara terang-terangan terhadap kedaulatan Suriah." (Al Quds, 2015). Pemerintah Turki pun merespon kecaman ini melalui menteri luar negerinya Davutoglu, ia mengatakan dalam konferensi pers: "Mereka (rezim Suriah) seharusnya mengambil kendali di negara mereka sendiri terlebih dahulu, dan berdamai dengan rakyat mereka, dan kemudian mereka baru bisa memberikan pernyataan dan pendapat mengenai hal ini. Bagi kami rezim yang menindas rakyatnya sendiri tidaklah berhak untuk mengkritik langkah-langkah Turki dalam upaya melindungi hak-haknya" (Arabic CNN, 2015).

b. Pembentukan Tentara Penaklukan (*Jaish Al Fatah*)

Berikutnya pada 24 Maret 2015, Turki bersama dengan Qatar dan Arab Saudi berkerja sama dalam membentuk kekuatan oposisi baru untuk melawan rezim Bashar Al Assad dan pasukan-pasukan pendukungnya dengan membentuk aliansi militer baru yang diberi nama "Tentara Penaklukan" (*Jaish Al Fatah*). Tentara penaklukan ini merupakan gabungan dari beberapa kelompok oposisi, diantaranya ialah Jabhat al-Nusra, Ahrar Al-Sham, Jund Al-Aqsa, Faylaq Al-Sham, dan Ajnad Al-Sham (Silmi, 2017: 13). Setelah tentara penaklukan ini terbentuk, Turki, Qatar dan Arab Saudi mulai mengirim senjata kepada mereka untuk memasok kebutuhan persenjataan mereka melalui Turki dengan memasukan senjata melewati perbatasan Turki-Suriah. Turki pun mengizinkan setiap orang asing yang ingin bergabung dengan kelompok ini untuk melintasi perbatasannya dan memasuki Suriah. (Lousavor, 2015). Bukan hanya senjata yang dipasok untuk tentara penaklukan ini, namun mereka juga melakukan operasi pelatihan kepada tentara penaklukan ini untuk melawan rezim Bashar Al Assad dan pasukan-pasukan pendukungnya (Al Wassat, 2015).

Tujuan Turki melakukan pembentukan ini adalah untuk menyatukan kelompok-kelompok oposisi islam sunni di bawah satu panji agar lebih kuat dalam melakukan penyerangan kepada pasukan pemerintah Suriah. dan Turki juga ingin memegang kontrol atas pasukan oposisi yang telah berhasil merebut wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh pasukan pemerintah Suriah (Turkpress, 2015). Bagi Turki pembentukan tentara penaklukan ini adalah sebuah metode penggabungan beberapa faksi di bawah satu komando yang terpadu, yang sebelumnya terjadi disitegrasi antar kelompok-kelompok oposisi karena meningkatnya perbedaan dan penyerangan timbal balik diantara mereka. Turki juga menunjuk Abdullah Al-Muhaysini seorang pendakwah dan orator ulung dari Arab Saudi untuk menjadi koordinator dalam menyatukan berbagai faksi-faksi oposisi agar koordinasi dan komunikasi anatar mereka berjalan dengan baik. Atas perintah intetejen Turki, Abdullah Al-Muhaysini diminta mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pemimpin faksi-faksi oposisi islam sunni untuk meyakinkan mereka agar bersatu dan bergabung dalam aliansi tentara penaklukan dan mengakhiri perbedaan antara sesama oposisi islam sunni untuk selanjutnya bersiap melakukan aksi militer untuk menyerang pasukan pemerintah Suriah yang berada di daerah pedesaan Idlib, Hama dan Aleppo (Noonpost, 2016). Setelah aliansi militer ini terbentuk, Turki, Qatar dan Arab Saudi juga sepakat untuk melakukan

pelatihan militer kepada 15.000 prajurit oposisi yang bergabung dalam tentara penaklukan dan akan melengkapi mereka dengan senjata (Stein, 2015).

Lalu setelah pembentukannya pada 24 Maret 2015, di hari yang sama mereka langsung memulai pertempuran pertamanya, dengan misi membebaskan kota Idlib dari kekuasaan pasukan pemerintah Suriah, dan misi ini disebut “Pertempuran Idlib”, perang ini dilakukan pada 24–28 Maret 2015, dan mereka berhasil memenangkan pertempuran ini setelah empat hari berperang dan mereka berhasil membebaskan kota Idlib sepenuhnya dari pasukan pemerintah Suriah. Dengan demikian Idlib menjadi provinsi kedua di luar kendali pemerintah Suriah setelah provinsi Raqqa (Joscelyn, 2016).

c. *Operasi Euphrates Shield*

Selanjutnya Turki melakukan operasi lintas batas yang dinamakan operasi *Euphrates Shield*. Operasi *Euphrates Shield* diluncurkan pertama kali pada tanggal 24 Agustus 2016 (Silmi, 2017: 16), operasi ini bertujuan untuk merebut kota Jarablus dari cengkeraman ISIS, kota Jarablus terletak di tepi barat Sungai Eufrat dan berdekatan dengan perbatasan Turki di pedesaan Utara Aleppo. Operasi ini juga bertujuan untuk mengamankan kota-kota perbatasan antara Turki dan Suriah dari pengaruh ISIS. Jarablus adalah kota perbatasan penting terakhir yang dikendalikan oleh ISIS sejak mereka berhasil memasukinya pada Januari 2014. Di sisi lain, Turki juga bertujuan mengambil kontrol kota Jarablus untuk mencegah pasukan SDF yang dikomandoi oleh YPG masuk ke kota ini lalu merebut dan mencaploknnya ke kota Manbij yang berjarak 36 km dari kota Jarablus. Sebelumnya SDF sudah berhasil merebut kota Manbij dari kekuasaan ISIS (Al Jazeera, 2016).

Operasi ini terdiri dari batalyon militer Turki yang berafiliasi dengan kelompok oposisi FSA. Dalam operasinya pasukan FSA menerima dukungan darat dan udara yang signifikan dari Satuan Tugas Khusus Gabungan Angkatan Bersenjata Turki dan angkatan udara koalisi internasional. Operasi ini dimulai dengan artileri dan peluncur roket yang menargetkan 220 target ISIS di kota Jarablus, diikuti oleh serangan terkonsentrasi oleh Angkatan Udara Turki dengan menggunakan pesawat F-16 dan juga drone dengan dukungan udara dari koalisi internasional, sementara kelompok oposisi FSA melakukan penyerangan darat kepada pejuang ISIS di pinggiran kota Jarablus (Al Jazeera, 2015).

Dari operasi ini Turki berhasil membebaskan kota Jarablus. Azaz, dan Al Bab dari kekuasaan ISIS dan YPG, dan operasi *Euphrates Shield* ini berakhir pada tanggal 31 Maret 2017, ditutup dengan pernyataan pemerintah Turki yang mengatakan bahwa operasi ini telah berhasil mencapai kepentingan nasional Turki yaitu membersihkan wilayah-wilayah perbatasan Turki-Suriah dari kelompok-kelompok yang dianggapnya teroris (BBC News, 2017).

d. *Operasi Olive Branch*

Operasi *Olive Branch* adalah operasi militer yang dipimpin oleh tentara Turki dengan partisipasi pasukan FSA untuk melawan YPG di kota Afrin yang dekat dengan perbatasan Turki, dalam operasi ini Turki menegaskan bahwa itu adalah operasi untuk melindungi keamanan nasionalnya dan selanjutnya Turki akan menyerahkan kota itu kepada rakyat Suriah. Operasi ini secara resmi dimulai oleh Turki pada hari Sabtu, 20 Januari 2018, setelah peresmian fase awal, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengumumkan bahwa operasi

ini dimulai di kota Afrin, dan akan berlanjut ke kota Manbij, dan akan berlanjut terus sampai perbatasan Irak (Al Jazeera, 2018). Operasi ini bertujuan untuk mengusir pasukan YPG dari daerah-daerah itu dan memperkuat keamanan wilayah-wilayah perbatasan Turki (CNN Arabic, 2018).

Pada fase awal operasi ini, Menteri Pertahanan Turki Nurettin Canikli mengumumkan bahwa pasukan FSA secara aktif berpartisipasi dalam operasi di kota Afrin ini. Operasi ini dimulai dengan pemboman udara dan artileri terus menerus terhadap posisi pasukan YPG, pemboman itu menargetkan 108 dari 113 sasaran militer. Situs utama yang ditargetkan adalah: stasiun radio di distrik Sheikh Hadid, markas Hajiko di Rajo, pos pemeriksaan Ghazawiya, Gunung Barsaya, Camp Qibar, desa Al-Malikiyah, Hamdia, Hajilar, Tell Sallour, Faririya, Brigade ke-135 dekat Qaibar, Tel Rifaat, dan Bandara Militer Ming (Al Jazeera, 2018). Sehari kemudian, pemerintah Turki mengumumkan bahwa pasukan FSA telah menguasai desa Sinjar. Perdana Menteri Turki Binali Yildirim juga mengungkapkan bahwa operasi *Olive Branch* akan dilaksanakan dalam empat tahap, di mana zona keamanan akan didirikan pada kedalaman 30 kilometer (Al Jazeera, 2018). Adapun hasil dari operasi ini adalah Turki berhasil mengambil alih kota Afrin dan memukul mundur pasukan YPG dari kota itu (TRT World, 2018). Operasi ini dinyatakan berakhir pada 24 Maret 2018 dengan keberhasilan Turki menguasai kota Afrin (Daily Sabah, 2021).

e. Operasi *Peace Spring*

Selanjutnya pada tanggal 9 Oktober 2019, Turki secara unilateral memutuskan untuk melakukan operasi militer bersama *Syrian National Army* (SNA) yang merupakan nama baru untuk FSA. Operasi ini dilakukan di wilayah otonomi Suriah, tepatnya di wilayah Utara dan Timur Suriah, dan operasi ini diberi nama operasi *Peace Spring*. Operasi ini bertujuan untuk membersihkan wilayah sepanjang perbatasan Turki-Suriah dari kelompok-kelompok yang dianggap teroris oleh Turki, khususnya PKK, PYD, dan YPG yang semuanya tergabung dalam SDF. Turki ingin memukul mundur mereka dari wilayah perbatasan Turki-Suriah untuk selanjutnya dibangun zona aman sebagai tempat kembalinya para pengungsi Suriah di Turki (Alaraby, 2022).

Pada hari ke dua dari operasi *Peace Spring*, Turki dan SNA mengepung kota Tal Abyad dan Ras Al-Ain di perbatasan, dan mereka berhasil menguasai 11 desa di sekitar kedua kota itu. Menurut Kementerian Pertahanan Turki, Operasi militer ini telah menewaskan 174 pejuang YPG, sementara itu 6 orang tentara Turki tewas dan 16 lainnya luka-luka akibat adanya sebuah mortir yang ditembakkan dari pihak pemerintah Suriah yang menghantam pusat kota Akcakale di perbatasan Turki. Lalu pasukan YPG membalas serangan Turki di wilayah Sanriulfa dan Nusaybin. Akibat serangan ini 8 orang tewas dan 71 orang luka-luka (Al Jazeera, 2019). Pada hari ke dua ini Turki mendapat banyak kecaman dan kutukan dari dunia internasional, mereka menyatakan bahwa ini merupakan invasi dan operasi ini harus dihentikan, jika operasi ini tidak dihentikan maka Turki akan mendapat banyak sanksi internasional. Akan tetapi Turki mengabaikan kecaman dan ancaman ini, dan Turki justru terus melanjutkan operasinya (Arab News, 2019).

Sampai pada hari ke ke delapan Turki berhasil mengepung keseluruhan kota Ras Al Ain, Turki juga berhasil mengambil alih 17 wilayah baru di kota Tal Amr dan menguasai

beberapa daerah pinggiran antara kota Tal Abyad dan Ain Isa. Hingga sampai fase ini Turki berhasil mengambil alih 68 wilayah yang mayoritas berada di kota Tal Abyad dan Ras Al Ain (Marefa, 2019). Lalu pada 17 Oktober 2019, wakil presiden Amerika Serikat Mike Pence berangkat ke Turki untuk menemui presiden Erdogan guna membahas perkembangan operasi *Peace Spring* di Suriah dan opsi genjatan senjata. Dan akhirnya pertemuan ini menghasilkan kesepakatan yang tertuang dalam 13 poin. Dan diantara poin-poin itu adalah Turki menyepakati adanya genjatan senjata antar semua pihak selama 120 jam, waktu ini digunakan untuk SDF menarik mundur pasukannya dari wilayah yang akan dijadikan zona aman oleh Turki. Jika Turki mentaati kesepakatan genjatan senjata ini, maka Amerika Serikat akan mencabut sanksi yang pernah diberikan kepada Turki. Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, maka berakhirilah operasi *Peace Spring* (Marefa, 2019).

KESIMPULAN

Konflik Suriah merupakan salah satu konflik terpanjang di era modern saat ini, konflik ini juga merupakan bagian dari gelombang *Arab Spring* yang terjadi di negara-negara Arab dimana masyarakat Arab menuntut revolusi di negaranya masing-masing dari sistem pemerintahan yang otoriter. Sebagai negara yang berbatasan langsung dengan Suriah, Turki merasa khawatir jika konflik di Suriah dapat mengancam keamanan negaranya, sebagai negara besar di kawasan Timur Tengah Turki juga ingin menancapkan peran dan pengaruhnya dalam proses revolusi di negara-negara Timur tengah, termasuk Suriah. dalam penelitian ini penulis menemukan ada dua kepentingan Turki dalam konflik Suriah. Pertama adalah kepentingan keamanan, dimana Turki merasa terancam dengan terbentuknya wilayah otonomi bagi Bangsa Kurdi di Wilayah Utara Suriah dan meningkatnya kekuatan PYD dan PKK di wilayah Utara Suriah. Kedua adalah kepentingan politik, dimana Turki berambisi ingin menjadi aktor regional dan berpengaruh di kawasan Timur Tengah.

Berdasarkan kepentingan-kepentingan itulah Turki melakukan intervensi dalam konflik Suriah untuk menjaga kepentingn nasionalnya, dalam hal ini penulis menemukan ada dua jenis intervensi yang dilakukan oleh Turki dalam konflik Suriah sejak tahun 2014-2019. Pertama adalah intervensi diplomatik, dimana Turki terlibat dalam Konferensi Jenewa II, Penolakan terhadap Pemilihan Presiden di Suriah, Keterlibatan Turki dalam Konferensi Jenewa III, dan keterlibatan Turki dalam pembentukan komite konstitusi Suriah. Kedua adalah intervensi militer, dimana Turki telah melakukan Operasi *Shah Euftrat*, Pembentukan Tentara Penaklukan (*Jaysh Al Fath*), Operasi *Euphrates Shield*, Operasi *Olive Branch*, dan Operasi *Peace Spring*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ayata, B. (2019). Turkish Foreign Policy in a Changing Arab World: Rice and Fall of a Regional Actor. *Journal of European Integration*, 37(1).
- Caves, J. (2012). Syrian Kurds and the Democratic Union Party (PYD). *Backgrounder, Institute for the Study of War (ISW)*, 6 December.
- Demir, I. (2017). Overconfidence and Risk Taking in Foreign Policy Decision Making: The Case of Turkey's Syria Policy. Istanbul: Department of International Relations, Marmara University Beykoz.
- Hatem, R., & Dohrmann, M. (2013). Ankara's Challenges: Turkey's Fix for the Kurdish Problem. *Middle East Quarterly*, XX(Fall).

- Luerdi. (2016). Intervensi Turki dalam Krisis Suriah (2011-2014). *Jurnal International Society*, 3(2).
- Pontoh, J. (2019). Analisis Kekerasan Terhadap Perang di Suriah Dalam Perspektif Konflik Johan Galtung (2011-2017). *Jurnal Damai dan Resolusi Konflik*, 5(3).
- Portzer, J. M. M. (2020). *The People's Protection Units' Branding Problem, Syrian Kurds and Potential Destabilization in Northeastern Syria*. USA: Army University Press.
- Sulaeman, D. Y. (2013). *Praha Suriah: Membongkar Persekongkolan Multinasional*. Depok: Iman Press.
- Starr, S. (2012). *Revolt in Syria: Eye-Witness to the Uprising*. London: C Hurst.
- Suryadi, U. (2016). *Metode Penelitian Hubungan Internasional*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Zalewski, P. (2013). Syria's Many Battlefields: Islamist Rebels Wage War Against the Kurds. *Time*. <https://world.time.com/2013/09/26/syrias-many-battlefields-islamist-rebels-wage-war-against-the-kurds/>
- Al Jazeera. (2014, February 2). Geneva talks: Progress towards peace? *Al Jazeera*. <https://www.aljazeera.com/program/inside-syria/2014/2/2/geneva-talks-progress-towards-peace>
- Arab News. (2023, August 2). Operation Peace Spring continues despite international objections. *Arab News*. <https://www.arabnews.com/node/operationalpeacespring>
- BBC. (2023, July 29). Turkey 'ends' Euphrates Shield campaign in Syria. *BBC*. <https://www.bbc.com/news/world-middle-east-39439593>
- Daily Sabah. (2023, August 1). Locals in Afrin grateful for Turkish efforts as 3 years passed since Operation Olive Branch. *Daily Sabah*. <https://www.dailysabah.com/politics/war-on-terror/locals-in-afrin-grateful-for-turkish-efforts-as-3-years-passed-since-operation-olive-branch>
- MEI. (2021, January 6). Syria's Constitutional Committee: The Devil in the Detail. *Middle East Institute*. <https://www.mei.edu/publications/syrias-constitutional-committee-devil-detail>